



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang di persyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, Renja Perangkat daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah. penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sejalan dengan hal tersebut dan dengan adanya perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Public Governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, dokumen



perencanaan merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena di dalam renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Selain itu renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian renja merupakan pedoman bagi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penyusunan renja DPMPTSP tahun 2023 merupakan kewajiban bagi DPMPTSP. Hal ini dilakukan untuk meng-akomodir dan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan kepala daerah yang tertuang di dalam penjabaran tugas dan fungsi DPMPTSP sebagaimana diinginkan oleh kepala daerah Kota Jambi. Adapun prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja perangkat daerah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD.
3. Rumusan Program/Kegiatan di dalam Renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif perangkat daerah.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, dan total kebutuhan dana.



Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DPMPTSP Kota Jambi dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kota Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum DPMPTSP Kota Jambi dalam menyusun Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



Jangka Mengengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor
10. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi.;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 6 Tahun 2022)
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
19. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 38)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2023 antara lain adalah :

1. Menyediakan dokumen rencana teknis DPMPTSP Kota Jambi dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai kelompok sasaran kegiatan.



2. Merumuskan Program – Program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja DPMPTSP Kota Jambi atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur.
4. Menjadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 yang memuat rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Jambi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2023.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan Pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2023 adalah :

1. Untuk membantu pencapaian hasil pelaksanaan program dan memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun kedepan.
2. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik secara terukur.



3. Menjamin konsistensi perencanaan teknis DPMPTSP Kota Jambi dengan arahan strategis visi dan misi Walikota Jambi terpilih sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kota Jambi.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk laporan kinerja DPMPTSP Kota Jambi maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2023 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan Penjelasan ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dan keterkaitan dengan dokumen RKPD Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah



1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Jambi adalah penjabaran perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Jambi tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut rencana kerja DPMPTSP Kota Jambi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Jambi selama tahun 2023.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan keluaran dan hasil.

Indikator-Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, buku dan sebagainya. Penetapan Indikator kinerja ini diikuti dengan



penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

TABEL REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN TA.2021

Realisasi program dan kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi tahun 2021 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diurutkan berdasarkan skala prioritasnya meliputi :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	PENYERAPAN	REALISASI	
				TARGET (%)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.782.947.509	5.290.467.384	100	91,48
	I Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.998.977	31.398.977	100	100
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Peramhkat Daerah	21.999.977	21.999.977	100	100
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.000	9.399.000	100	94
	II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.152.268.251	3.871.864.243	100	93,25
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.828.983.056	3.569.081.613	100	93,21
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verivikasi Keuangan SKPD	299.990.735	279.488.170,	100	93,17
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	7.499.742	7.499.742	100	100
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.794.718	15.794.718	100	100
	III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.000.000	49.000.000	100	69,01
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.000.000	49.000.000	100	87,50
	2 Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	-		



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.764.549	381.130.628	100	85,12
1	Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik Penerangan Penerangan Bangunan Kantor	16.998.300	16.998.300	100	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	154.399.759	153.395.460	100	99,35
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.851.760	91.795.000	100	99,94
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.000.000	16.342.500	100	68,09
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.514.730	102.599.368	100	63,92
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.934.700	67.360.500	100	99,15
1	Pengadaan Mebel	15.460.500	15.460.500,	100	100
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.474.200	51.900.000	100	98,91
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.001.650	539.976.336	100	86,53
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.874.550	5.872.750	100	99,97
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	355.100.000	271.076.486	100	76,34
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	263.027.100	263.027.100	100	100
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.979.382	349.136.700	100	89,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.925.000	9.763.700	100	98,37
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.730.000	203.154.500	100	99,23
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.506.200	104.668.500	100	73,97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	31.818.182	31.550.000	100	99,16



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
II		Program Pengembanagn Iklim Penanaman Modal	56.224.800	56.024.800	100	99,64
	I	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	56.224.800	56.024.800	100	99,64
	1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	56.224.800	56.024.800	100	99,64
III		Program Promosi Penanaman Modal	190.135.546	149.113.774	100	78,42
	I	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	190.135.546	149.113.774	100	78,42
	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	49.024.815	48.824.815	100	99,59
	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	141.110.731	100.288.959	100	71,07
IV		Program Pelayanan Penanaman Modal	738.350.389	726.693.739	100	98,42
	I	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	738.350.389	726.693.739	100	98,42
	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	604.320.519	602.040.519	100	99,62
	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	83.279.870	75.029.870	100	90,09
	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50.750.000	49.623.350	100	97,78
V		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	611.003.467	490.695.882	100	80,31
	I	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	611.003.467	490.695.882	100	80,31
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	152.439.880	150.486.801	100	98,72
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	115.463.777	94.655.271,	100	81,98
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	343.099.810	245.553.810	100	71,57



VI		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	67.499.620	67.499.620	100	100
	I	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.499.620	67.499.620	100	100
	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	67.499.620	67.499.620	100	100

Tahun 2021 terjadi refocusing penangan covid 19 pada beberapa sub Kegiatan dan beberapa sub kegiatan yang tidak berjalan sama sekali dikarenakan kondisi covid 19 antara lain Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi Belanja Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Tidak Langsung	3.828.983.056	3.569.081.613	91,05
2.	Belanja Langsung	3.617.178.275	3.210.813.586	93,21
	JUMLAH	7.446.161.331	6.779.895.199	91,05

Untuk belanja tidak langsung capaian realisasi 91,05 % atau sebesar Rp.3.569.081.613,- dari dana ditetapkan Rp.3.828.983.056,-, sedangkan belanja langsung capaian realisasi keuangan 93,21% atau sebesar Rp. 3.617.178.275,- dari dana ditetapkan Rp.3.828.983.056

TABEL T-C.29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2023)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-3)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2020										
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN		2.214.207.000,00	2.073.666.435,00	-	-			2.073.666.435	93,65
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	Terwujudnya tertib administrasi kendaraan dan surat menyurat	15.500.000,00	12.155.300					12.155.300	78,42
	Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi telekomunikasi sumber daya air dan Listrik	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Rutin Perkantora	391.700.000,00	319.451.835					319.451.835	81,56
	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dan Aset	pengelolaan keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa yang akuntabel	216.384.000,00	190.297.000					190.297.000	87,94
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	pelaksanaan kegiatan perkantoran	652.143.000,00	647.984.000					647.984.000	99,36
	Penyediaan ATK barang cetakan dan Penggandaan	kelancaran administrasi kantor	169.250.000,00	169.225.750					169.225.750	99,99
	Penyediaan makan dan Minum	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu serta harian	34.446.000,00	16.512.500					16.512.500	47,94



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Penggandaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung kantor	Peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor dalam kondisi baik	297.850.000,00	286.630.500					286.630.500	96,23
	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	199.800.000	194.690.500					194.690.500	97,44
	Pembangunan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	Gedung/Bangunan Utilitas Kantor kondisi baik	237.134.000	236.719.050					236.719.050	99,83
	Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur		199.611.000	155.135.494					155.135.494	77,72
	Pengadaan Pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	Keseragaman pakaian dinas	38.680.000	38.680.000					38.680.000	100,00
	Pendidikan dan pelatihan/ Bimbingan Teknis /Kursus	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur sesuai kebutuhan	-						-	0,00
	Perjalanan Dinas	Rakor dan Konsultasi Luar Daerah	160.931.000	116.455.494					116.455.494	72,36
	Program Perencanaan, pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		31.000.000	30.946.200					30.946.200	99,83
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan	Konsistensi Dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaporan Perangkat Daerah	20.000.000	19.946.500					19.946.500	99,73
	Penyusunan laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan dan aset perangkat Daerah	11.000.000	10.999.700					10.999.700	100,00
	Pengembangan data/ Informasi dan Inovasi	Tersedianya aplikasi, jenis data, profil	-						-	



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		372.414.000	298.466.750					298.466.750	80,14
	Pengembangan potensi unggulan daerah	Setiap Tahunnya Investor berskala nasional berinvestasi di Kota Jambi	44.494.000	40.620.000					40.620.000	91,29
	Penyusunan rencana Penanaman Modal Daerah	Terlaksananya RKPPMD Kota Jambi Penyusunan buku peluang dan potensi investasi	60.795.000	59.915.000					59.915.000	98,55
	Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya kepatuhan investor dalam menyampaikan LKPM	96.525.000	39.924.200					39.924.200	41,36
	Pengelolaan system Pelayanan Penanaman Modal dan perizinan secara elektronik	Meningkatnya sistem pelayanan perizinan penanaman modal	170.600.000	158.007.550					158.007.550	92,62
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan		406.792.000	399.642.800					399.642.800	98,24
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Perizinan	134.365.000	132.193.300					132.193.300	98,38
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pembangunan lingkungan	168.100.000	163.260.000					163.260.000	97,12
	Pengelolaan data dan Penataan Arsip Perizinan	Tertatanya dan Terpeliharanya Data dan Arsip Perizinan	38.415.000	38.365.000					38.365.000	99,87
	Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan perizinan	Tersedianya informasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizina	65.912.000	65.824.500					65.824.500	99,87
	2021 dan 2022									



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi			5.782.947.509	5.289.867.384		6.333.187.391	11.623.054.77 5	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Nilai Akip	0		31.998.977	31.398.977	98	31.998.977	63.397.954	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku			21.999.977	21.999.977	100	21.999.977	43.999.954	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku			9.999.000	9.399.000	94	9.999.000	19.398.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan			4.152.268.251	3.871.864.243	93	4.177.195.254	8.049.059.497	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku			3.828.983.056	3.569.081.613	93	3.814.624.262,00	7.383.705.875	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			299.990.735	279.488.170	93	339.278.172,00	618.766.342	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai ketentuan yang berlaku			7.499.742	7.499.742	100	7.498.730,00	14.998.472	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan/semesteran DPMPSTP Kota Jambi sesuai ketentuan yang berlaku			15.794.718	15.794.718	100	15.794.090,00	31.588.808	



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prsentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai			71.000.000	49.000.000	69	188.680.000	237.680.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas harian, Jumlah Pakaian Dinas Harian dan Sepatu lapangan			56.000.000	49.000.000	88	88.680.000,00	137.680.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Peraturan Perundang-Undang			15.000.000		-	100.000.000,00	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			447.764.549	381.130.628	85	639.993.810	1.021.124.438	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			16.998.300	16.998.300	100	16.998.300,00	33.996.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			154.399.759	153.395.460	99	123.596.660,00	276.992.120	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			91.851.760	91.795.000	100	90.973.850,00	182.768.850	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan Bungkus, Makanan Kotak Minuman Botol Kaca, Snack Kotak			24.000.000	16.342.500	68	44.075.000,00	60.417.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luas Daerah dan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			160.514.730	102.599.368	64	364.350.000,00	466.949.368	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			67.934.700	67.360.500	99	256.442.500	323.803.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur			15.460.500	15.460.500,00	100	8.893.500,00	24.354.000	



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			52.474.200	51.900.000	99	247.549.000,00	299.449.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			624.001.650	539.976.336	87	639.955.650	1.179.931.986	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa			5.874.550	5.872.750	100	23.078.550,00	28.951.300	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Sumber Daya Air, Jumlah Jasa Sumber Daya Internet dan Jumlah Jasa Sumber Daya Listrik			355.100.000	271.076.486	76	353.850.000,00	624.926.486	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor, Pengemudi dan Pengamanan Kantor			263.027.100	263.027.100	100	263.027.100,00	526.054.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			387.979.382	349.136.700	90	398.921.200	748.057.900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK/KIR Administrasi			9.925.000	9.763.700	98	9.925.000,00	19.688.700	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			204.730.000	203.154.500	99	204.730.000,00	407.884.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara			141.506.200	104.668.500	74	129.466.200,00	234.134.700	



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan gedung kantor			-	0	-		-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor yang Terpelihara			31.818.182	31.550.000	99	54.800.000,00	86.350.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jumlah investor dalam berinvestasi			56.224.800	56.224.800	100	71.323.400	127.548.200	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya kepastian hukum dalam kemudahan berinvestasi			56.224.800	56.024.800	100	71.323.400	127.348.200	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Peraturan Walikota			56.224.800	56.024.800	100	71.323.400,00	127.348.200	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Rencana Investasi			190.135.546	149.113.774	78	233.758.660	382.872.434	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpromosinya informasi peluang dan Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Jambi			190.135.546	149.113.774	78	233.758.660	382.872.434	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Promosi Investasi di dalam dan luar Kota Jambi			49.024.815	48.824.815	100		48.824.815	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				141.110.731	100.288.959	71	233.758.660,00	334.047.619	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			738.350.389	726.693.739	98	1.069.593.771	1.796.287.510	



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			738.350.389	726.693.739	98	1.069.593.771	1.796.287.510	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Ijin yang diterbitkan			604.320.519	602.040.519	100	927.143.773,00	1.529.184.292	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Sarana da Prasarana serta Ijin Usaha yang memenuhi Komitmen			83.279.870	75.029.870	90	82.013.550,00	157.043.420	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penurunan Tingkat Pengaduan Konsultasi dari tahun Sebelumnya			50.750.000	49.623.350	98	60.436.448,00	110.059.798	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pelaksanaan Perizinan oleh Pelaku Usaha Sesuai Dengan Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			611.003.467	490.695.882	80	659.249.019	1.149.944.901	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal			611.003.467	490.695.882	80	659.249.019	1.149.944.901	



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan			152.439.880	150.486.801	99	159.629.623,00	310.116.424	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Bimtek Tata Cara Pengisian LKPM Online			115.463.777	94.655.271,00	82	115.262.146,00	209.917.417	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perizinan dan Non Perizinan			343.099.810	245.553.810	72	384.357.250,00	629.911.060	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			67.499.620	67.499.620	100	47.222.759	114.722.379	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			67.499.620	67.499.620	100	47.222.759	114.722.379	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Pada Tingkat Kota			67.499.620	67.499.620	100	47.222.759,00	114.722.379	



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2021

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu koordinasi perumusan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal Secara terpadu, dan fungsi perumusan kebijakan teknis dan penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan pelaksanaan koordinasi, memfasilitasi investor dan administrasi serta evaluasi terhadap pelayanan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal

Sesuai dengan Perpres Nomor 27 tahun 2009 tentang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bidang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memiliki tolak ukur pelayanan untuk menghasilkan mutu pelayanan prima yang terukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan kepastian hukum. Seiring dengan perubahan waktu dan sesuai dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, fungsi pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi hingga saat ini.

Dalam Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah menerbitkan beberapa bentuk dokumen perizinan yang dilayani. Adapun data rekap Jumlah Izin pada tabel berikut dibawah ini

Tabel 1. Dokumen Perizinan yang diterbitkan Tahun 2021

No. DOKUMEN IZIN YANG TERBIT		
1.	Dokumen Izin Usaha Terbit	2.602
2.	Dokumen Izin IMB	4.246
3.	Dokumen Izin Registrasi	3.421
4.	Dokumen Izin Usaha Perawat dan sejenisnya	2.954

Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi

Pada bagian ini menjelaskan tentang Realisasi Investasi, Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 Penanaman Modal atau investasi merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia. Setiap pelaku usaha atau penanaman modal yang menanamkan modal usaha di wilayah Republik Indonesia Wajib melakukan Kegiatan Laporan Penanaman Modal, hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha sehingga pemerintah dalam hal ini BKPM dapat mengetahui Realsisasi Investasi setiap tahunnya. Berikut Investasi dan Capaian Realisasi Investasi pada Tahun 2021 di Kota Jambi.

Triwulan	Jumlah Investasi	Proyek	TKI	TKA
PMA TW I	7.756.980.000	14	1	2
PMDN TW I	414.322.700.000	742	771	
PMA TW II	36.457.660.000	9		
PMDN TW II	24.184.700.000	445	159	
PMA TW III	14.413.120.000	15		



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

PMDN TW III	48.832.700.000	405	332	
PMA TW IV	46.654.300.000	14		
PMDN TW IV	60.557.400.000	267	190	
Total	653.179.560.000	1911	1453	2

Sumber NSWI

Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Tahun 2021 (Milyar)	Realisasi	Capaian Tahun 2021 thd Renstra
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Rupiah	474,62	653.179.560.000	137,62%

Sumber : NSWI dan OSS RBA

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan jumlah Realisasi Investasi di Kota Jambi yang dilaporkan Oleh pelaku usaha dari triwulan I s/d IV tahun 2021 melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan angka capaian realisasi investasi pada tahun 2021 sebesar Rp.653.179.560.000,00. Hal tersebut didapat melalui akumulasi LKPM Online yang telah disetujui oleh BKPM Pusat sebanyak 1911 Proyek yang bergerak pada Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tersier.

Selanjutnya dapat dijelaskan rumusan indikator dan formulasi perhitungan antara target realisasi investasi dan Realisasi Investasi

Rumusan Indikator dan formulasi Perhitungan 2021

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Keterangan
Target Realisasi Investasi (Renstra/RPJMD)	430.500.000.000	474.620.000.000	
Realisasi Investasi	249.446.980.393	653.179.560.000	
Peningkatan Realisasi Investasi		161,85	$\frac{RI\ 2021 - RI\ 2020}{RI\ 2020} \times 100\%$
Capaian Target Realisasi		137,62%	$\frac{R.Investasi\ 2021}{RI\ Target} \times 100\%$

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas membantu Pemerintah Kota Jambi di bidang penanaman Modal, sasaran utama dari rencana kegiatan ini adalah para investor dalam dan luar negeri yang sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Surve Kepuasan Masyarakat

Untuk mengoptimalkan Kualitas Pelayanan, Pemerintah terus melakukan terobosan baru melalui pendekatan masyarakat. olehnya itu kementerian pendayagunaan aparatur negara nomor 16 tahun 2014 telah menetapkan kebijakan tentang pedoman Surve Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan publik. Pedoman dimaksud adalah sebagai acuan untuk mengevaluasi tingkat kinerja instansi DPMPSTSP diharapkan dapat memberikan



kepastian kepada masyarakat dalam menilai secara objektif dan kontinyu terhadap perkembangan kerja unit pelayanan publik.

Dalam penyusunan SKM digunakan kuisioner sebagai alat bantu untuk pengumpulan data yang diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi yang menggunakan sembilan (9) unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel. Nilai Unsur Pelayanan DPMPTSP Kota Jambi

No.	Unsur Pelayanan	Bobot Rata -Rata Unsur	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi
1	2	3	4	5	6=5x25
U1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Jenis Pelayanan	1401	3,328	0,355	8,875
U2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	1383	3,187	0,351	8,775
U3	Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	1620	3.733	0,411	10,275
U4	Kemungkinan adanya pungutan Biaya lainnya selain tarif	1736	4	0,44	11
U5	Kesesuaian produk Pelayanan antar tercantum dalam Standar Pelayanan dengan hasil yang diberikan	1390	3,203	0,352	8,8
U6	Kompetensi/kemampuan Petugas memberikan Pelayanan	1669	3,846	0,423	10,575
U7	Perilaku petugas dalam Pelayanan terkait Kesopanan dan Keramahan	1408	3,244	0,357	8,925
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	1397	3,219	0,354	8,85
U9	Penanganan Pengaduan Layanan Pengaduan	1558	3,59	0,395	9,875

Tabel. Nilai Konversi IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 – 1,75	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	1,76 – 2,50	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	2,51 – 3,25	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,26 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Tabel. Kesimpulan dan Analisis IKM

No	Indikator	Kesimpulan
1	IKM setelah dikonversi	85,93
2	Mutu Pelayanan	B
3	Kinerja Unit Pelayanan	BAIK

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Jambi tahun 2021 mendapatkan nilai IKM sebesar 85,93 atau kategori **BAIK "B"**, jika dibandingkan dengan nilai IKM tahun lalu ada kenaikan sebesar 1,68. Tingginya nilai IKM mengindikasikan bahwa layanan perizinan DPMPTSP sudah sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam SOP Penyelenggaraan Perizinan. Walaupun terjadi kenaikan nilai IKM tahun 2021 ada unsur pendukung IKM yang mengalami penurunan yaitu Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan. Penurunan ini disebabkan adanya perubahan penyelenggaraan perizinan dari system manual ke system online. Perubahan sistem ini akan maksimal jika didukung oleh SDM serta sarana prasara masyarakat khususnya



pelaku usaha. Adanya perubahan OSS versi 1.1 menjadi system OSS RBA sangat berdampak bagi pelaku usaha di setiap daerah. Selain itu pandemi Covid 19 juga mempengaruhi pelaku usaha untuk mengurus perizinan dan Non perizinan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Kota Jambi

No	Indikator (IKU,SPM,IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU,SPM,IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		85,5	86	86	87	88	83,66	84,25	85,93	86	
2	Realisasi Investasi		410 M	430.5 M	474.62 M	498.35 M	523.37 M	1.055,3	249,5	653.179.560.000	500 M	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah melakukan banyak perubahan dengan melengkapi sarana prasarana sesuai dengan SOP sebagai salah satu garda depan dalam hal pelayanan publik dan melengkapi informasi yang berkaitan dengan investasi sehingga diharapkan mendorong minat investor untuk berinvestasi di Kota Jambi. Dan perubahan ini dibuktikan dengan meningkatnya Investasi di Kota Jambi.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan

Pelayanan OPD

Dari ke 9 Unsur pelayanan yang di nilai, **nilai kinerja IKM terendah adalah kemudahan prosedur pelayanan 3,187 dengan nilai kualitatif baik “B”** sedangkan kinerja IKM yang tertinggi adalah Kemungkinan adanya pungutan biaya lain selain tarif sebesar 4 dengan nilai kualitatif kepuasan **sangat Baik “A”**. Interval antara kedua nilai tersebut dapat diartikan bahwa dari 9 unsur pelayanan yang dinilai belum seluruhnya menunjukkan sangat baik, namun tidak terdapat unsur pelayanan yang sangat kurang atau kurang baik.

Berdasarkan analisa pengolahan data maka nilai indeks secara keseluruhan diperoleh angka indeks 3,438 dengan demikian dapat di simpulkan nilai IKM setelah dikonversi adalah sebesar 85,93 dengan pengertian bahwa pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi pada kategori Kinerja BAIK dengan nilai Mutu Pelayanan “B”

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Semua Program atau Kegiatan pada DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2021 menunjang pada Keberhasilan pencapaian pernyataan/perjanjian kinerja, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Dalam artian semua kegiatan dapat terlaksana, sasaran strategis dinas yang merupakan IKU DPMPTSP tahun 2021 tidak tercapai, IKM Tahun 2021 mengalami kenaikan dengan nilai 85,93 walaupun tidak mencapai target, dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar



84,25 yang disebabkan adanya perubahan penurunan nilai interval dan dengan adanya aplikasi sistem OSS (online single submission) dalam pelayanan perizinan yang diterapkan. Adapaun permasalahan yang dihadapi masih mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait OSS untuk memahami sistem ini dan juga bagaimana memfasilitasi dunia usaha untuk menggunakan sistem.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian Program Nasional/Internasional. (SPM dan SDGs)

Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sebagai penjabaran dari visi misi Kota Jambi yang akan mendukung dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian Program Nasional melalui program dan Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat Maupun Daerah. Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat

Daerah.

1. Persaingan yang semakin ketat
2. Ketersediaan akses internet tentang pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha secara elektronik dan terintegrasi.
3. Pembangunan Sumber daya manusia dalam menghadapi investasi digital ekonomi.
4. Komitmen Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kinerja/kesanggupan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
5. Adanya Dukungan Sarana dan Prasarana yang optimal terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.
6. Dukungan Anggaran yang memadai dari pemerintah Kota Jambi dalam Melaksanakan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
7. Semakin Tingginya tuntutan penerapan teknologi Informasi dalam bidang promosi, pelayanan perizinan, Penyajian data investasi dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha.
8. Kurangnya pemahaman penanaman modal terhadap ketentuan dan kepatuhan/kewajiban dalam merealisasikan penanaman Modal.
9. Adanya Dorongan publik menjadikan DPMPTSP menjadi institusi yang terpercaya



2.3.5 Formulasi Isu – Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan Fungsi DPMPTSP terdapat isu isu penting guna meningkatkan Realisasi Investasi di Kota Jambi yaitu :

1. Peningkatan Realisasi PMA dan PMDN dalam Mendukung pembiayaan pembangunan Daerah.
2. Peningkatan Pemenuhan Standar pelayanan.
3. Peningkatan Kulaitas Pengawasan Pelaksanan Berusaha
4. Peningkatan penyediaan data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2023 (terlampir) akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2023, hal ini disebabkan karena program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi bersifat rutin dan terus menerus.



**Tabel T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN /PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				
2023						2023				
N o	PROGRAM/KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGI ATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIA N	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGI ATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIA N	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi	B	7.805.031.966,34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi	B	7.805.031.966,34
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Penilaian Nilai Akip	100%	34.752.437,40	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Penilaian Nilai Akip	100%	34.752.437,40
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	:Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen Perencanaan	2 Dokume n 2 Dokume n	24.182.904,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	:Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen Perencanaan	2 Dokume n 2 Dokume n	24.182.904,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokume n	10.569.533	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokume n	10.569.533



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan (menunjang tercapainya predikat WTP)	100%	4.104.335.862,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan (menunjang tercapainya predikat WTP)	100%	4.104.335.862,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku	30 Orang	3.814.624.262,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku	30 Orang	3.814.624.262,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD DPMPSTSP Kota Jambi sesuai ketentuan yang berlaku	9 kali	5.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD DPMPSTSP Kota Jambi sesuai ketentuan yang berlaku	9 kali	5.000.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	-Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Jasa, Pengelola Barang Milik Daerah yang dapat dibayarkan selama 12 bulan sesuai ketentuan yang berlaku'-Jumlah Jasa Tenaga Kontrak (Operator) '-Jumlah Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Dokumen Pembayaran SPP/SPM GU/LS Pihak Ke-3/LS Gaji dan Tunjangan dan TU yang dapat diselesaikan selama 12 Bulan sesuai ketentuan	20 Orang1 Orang45 Dokumen37 Orang	260.211.600,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	-Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Jasa, Pengelola Barang Milik Daerah yang dapat dibayarkan selama 12 bulan sesuai ketentuan yang berlaku'-Jumlah Jasa Tenaga Kontrak (Operator) '-Jumlah Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Dokumen Pembayaran SPP/SPM GU/LS Pihak Ke-3/LS Gaji dan Tunjangan dan TU yang dapat diselesaikan selama 12 Bulan sesuai ketentuan	20 Orang1 Orang45 Dokumen37 Orang	260.211.600,00



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

			yang berlaku'- Jumlah Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Non Asn yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan					yang berlaku'- Jumlah Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Non Asn yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	8.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	8.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Kota Jambi	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan/semestera n DPMPTSP Kota Jambi sesuai ketentuan yang berlaku	9 Kali	16.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Kota Jambi	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan/semestera n DPMPTSP Kota Jambi sesuai ketentuan yang berlaku	9 Kali	16.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	Prsentase Pemenuhan Prasarana	100%	281.676.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	Prsentase Pemenuhan Prasarana	100%	281.676.500,00



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

			Kedisiplinan Pegawai					Kedisiplinan Pegawai		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas harian	70 pegawai	156.676.500,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas harian	70 pegawai	156.676.500,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	25 kali	125.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	25 kali	125.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Pelaksanaan Administrasi Tugas dan Fungsi OPD berjalan dengan baik	100%	822.963.983,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Pelaksanaan Administrasi Tugas dan Fungsi OPD berjalan dengan baik	100%	822.963.983,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	9 Jenis	18.151.830,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	9 Jenis	18.151.830,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Jenis ATK	1 Unit , 1 Buah dan 43 Paket	148.948.438,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Jenis ATK	1 Unit , 1 Buah dan 43 Paket	148.948.438,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 Jenis	96.188.715,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 Jenis	96.188.715,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan jamuan tamu	2 Laporan	84.675.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan jamuan tamu	2 Laporan	84.675.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Tersedianya sub kegiatan dengan target, tolok ukur, kinerja dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	475.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Tersedianya sub kegiatan dengan target, tolok ukur, kinerja dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	475.000.000,00



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	730.962.578,94	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	730.962.578,94
	Pengadaan Mebel	Kota Jambi	Jumlah Pengadaan Mebeleur	1 Paket dan 2 Unit	207.172.620,00	Pengadaan Mebel	Kota Jambi	Jumlah Pengadaan Mebeleur	1 Paket dan 2 Unit	207.172.620,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	523.789.959		Kota Jambi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	523.789.959
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.250.033.605,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.250.033.605,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	Jumlah Jenis ATK Jumlah Surat Masuk dan Keluar	2 Jenis 2350 Lembar	23.938.155,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	Jumlah Jenis ATK Jumlah Surat Masuk dan Keluar	2 Jenis 2350 Lembar	23.938.155,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi	: Jasa Pemadam Kebakaran Jumlah Jasa Daya Internet Jumlah Jasa Daya Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air Jumlah Tagihan telepon	5 Tagihan	673.650.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi	: Jasa Pemadam Kebakaran Jumlah Jasa Daya Internet Jumlah Jasa Daya Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air Jumlah Tagihan telepon	5 Tagihan	673.650.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Jambi	Jumlah Tenaga administrasi jasa kebersihan kantor, pengemudi dan pengaman kantor	27 Orang	552.445.450,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Jambi	Jumlah Tenaga administrasi jasa kebersihan kantor, pengemudi dan pengaman kantor	27 Orang	552.445.450,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	580.307.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	580.307.000,00



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Jambi	Jumlah STNK/KIR Administrasi	28 Unit	14.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Jambi	Jumlah STNK/KIR Administrasi	28 Unit	14.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jambi	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	28 Unit	303.070.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jambi	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	28 Unit	303.070.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah jasa perbaikan peralatan Kerja	135 Unit	151.737.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah jasa perbaikan peralatan Kerja	135 Unit	151.737.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Jambi	Jumlah pemeliharaan bangunan gedung kantor	135 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Jambi	Jumlah pemeliharaan bangunan gedung kantor	135 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor yang Terpelihara	1 Tahun	111.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor yang Terpelihara	1 Tahun	111.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Jambi	Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yang Berinvestasi di Kota Jambi	2 Investor	71.570.717,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Jambi	Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yang Berinvestasi di Kota Jambi	2 Investor	71.570.717,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Tersedianya Informasi Peluang dan Potensi Investasi di Kota Jambi	1 dokumen	71.570.717,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Tersedianya Informasi Peluang dan Potensi Investasi di Kota Jambi	1 dokumen	71.570.717,00
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71.570.717,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71.570.717,00



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Jambi	Peningkatan Jumlah Calon Investor (pengunjung)	10%	339.991.996	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Jambi	Peningkatan Jumlah Calon Investor (pengunjung)	10%	339.991.996
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Investasi Penanaman Modal Di kota Jambi	100%	339.991.996	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Investasi Penanaman Modal Di kota Jambi	100%	339.991.996
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Jambi				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Jambi			
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	339.991.996	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	339.991.996
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Jambi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	88	1.054.740.653	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Jambi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	88	1.054.740.653
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Jambi	Terlaksananya pelayanan pengaduan, konsultasi beserta Indeks Kepuasan masyarakat	90%	1.054.740.653	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Jambi	Terlaksananya pelayanan pengaduan, konsultasi beserta Indeks Kepuasan masyarakat	90%	1.054.740.653
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Jambi	Jumlah Ijin yang diterbitkan	5000 Izin	896.080.400	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Jambi	Jumlah Ijin yang diterbitkan	5000 Izin	896.080.400



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Jambi	Jumlah ijin yang diterbitkan	2000 izin	90.214.905	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Jambi	Jumlah ijin yang diterbitkan	2000 izin	90.214.905
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Jambi	Jumlah orang yang memperoleh konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan	30 Orang	68.445.348	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Jambi	Jumlah orang yang memperoleh konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan	30 Orang	68.445.348
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Jambi	Ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal	10%	523.540.129	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Jambi	Ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal	10%	523.540.129
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	523.540.129	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	523.540.129
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Jambi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 Kegiatan Usaha	133.860.108	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Jambi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 Kegiatan Usaha	133.860.108
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Jambi	Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (bimtek)	90 Pelaku Usaha	85.959.411	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Jambi	Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (bimtek)	90 Pelaku Usaha	85.959.411



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Jambi	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	400 Kegiatan Usaha	303.720.610	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Jambi	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	400 Kegiatan Usaha	303.720.610
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Jambi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	8 Dokumen	86.041.473	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Jambi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	8 Dokumen	86.041.473
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Tersedianya data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola, dikaji dan dimanfaatkan	8 Dokumen	86.041.473	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Tersedianya data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola, dikaji dan dimanfaatkan	8 Dokumen	86.041.473
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Jambi	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Pada Tingkat Kota	8 Dokumen	86.041.473	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Jambi	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Pada Tingkat Kota	8 Dokumen	86.041.473
					9.880.916.934					9.880.916.934

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagan ini belum ada hasil kajian terhadap program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung di tujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan Informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/Kota.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi adalah Unsur Pelaksana otonomi Daerah untuk menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Berdasarkan Telaah dan sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional terdapat berbagai Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Jambi diantaranya terkait dengan Birokrasi dengan tata kelola, Iklim Investasi dan Iklim Usaha serta Inovasi teknologi sebagai penunjang kelancaran Pelayanan Publik dalam hal Perizinan di Kota Jambi.

Dalam Rangka Peningkatan Penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu meningkatkan kemudahan berusaha sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang sering disebut dengan *Online Single Submission (OSS)* serta amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Taeget Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas dan jangkauan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinandan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	87
2	Meningkatkan Investasi	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Jumlah Investasi PMA/PMDN	498,35 M

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan Tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan. Berdasarkan hal tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi adalah Meningkatkan Investasi di Kota Jambi.

Untuk dapat mencapai Tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan strategi dan langkah – langkah yang akan dilakukan DPMPTSP Kota Jambi sebagai berikut :

1. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu memberikan Pelayanan Prima kepada Investor pada khususnya dan Masyarakat Kota Jambi pada umumnya.
2. Meningkatkan koordinasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal serta perumusan kebijakan yang mendukung investasi.



3. Melakukan proses penyederhanaan proses pelayanan perizinan dan investasi.
4. Meningkatkan motivasi dan inisiatif masyarakat untuk mengurus legalitas usahanya agar masyarakat dapat berusaha dengan tenang dan nyaman.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat.
6. Meningkatkan analisa potensi sumber daya dan penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat

Tabel 3.2.1

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88
2	Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi	523,37 M

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan merupakan bagian penting dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal.
3. Meningkatnya Realisasi Investasi.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

4. Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan data dan informasi penanaman modal.
5. Terciptanya kepercayaan publik terhadap integritas DPMPTSP Kota Jambi.
6. Terbangunnya sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi melalui jaringan elektronik sehingga bisa diakses dengan mudah oleh publik.
7. Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kota Jambi.

Tabel 3.2.2
**Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	88
2	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi	523,37 M

Tabel 3.2.3
Sasaran Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88
2	Realisasi Investasi	523,37 M



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2018-2023 adalah :

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna:

Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional;

Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil



inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;

Berakhlak : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;

Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;

Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;



3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

b. Sasaran dan Program

Sasaran dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
		Kegiatan:	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
2	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
		Kegiatan:	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota



2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai kewenangan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya di jadikan acuan bagi perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).



Program dan kegiatan diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan – kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi tahun 2022 adalah Program sebanyak 6 Program dan 12 Kegiatan.

3. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat Daerah tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 di sajikan pada tabel T-C 33 penyajian program dan kegiatan di lakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan Pemerintahan yang di maksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas Pembangunan tahun 2023

BAB V

PENUTUP

Renja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen Perencanaan tahunan yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada anggaran Tahun 2023. Renja ini secara substansial merupakan bagian dari perencanaan awal tahun pada pembangunan jangka menengah daerah Kota Jambi, dengan penyesuaian terkait periode kepemimpinan kepala Daerah. Dokumen Renja DPMPTSP Tahun 2023 ini telah menyelaraskan pada arah kebijakan pembangunan Nasional Kota Jambi Tahun 2023.

Dalam perkembangannya jika terdapat perubahan kondisi makro nasional maupun daerah atau terdapat kebijakan lainnya maka dimungkinkan untuk mengubah dokumen ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sebagai perubahan Renja Tahun 2023. Perubahan berikutnya terhadap isi dokumen Renja Tahun 2023 ini hanya akan dilakukan bila terjadi keadaan yang benar – benar di luar dugaan, dan adanya kebijakan nasional yang perlu diakomodir oleh DPMPTSP Kota Jambi. Sebelum adanya perubahan dokumen ini maka Renja ini digunakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berlangsung.

Penyusunan Renja didahului dengan mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, memperhatikan arah dan prioritas kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta target capaian rencana strategis lembaga. Dalam hal ini rencana strategis lembaga belum terdapat dokumen Resmi maka didasarkan pada rancangan Renstra yang telah di susun. Usulan program dan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, memperhitungkan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

serta mengacu pada perencanaan jangka panjang dan pencapaian target yang telah di tetapkan.

Jambi, 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



FAHMI.SP
Pembina Utama Muda
Nip. 19670205 199803 1 004





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**